



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email: kemenkomaritim@maritim.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 010/MARVES/SESMENKO/KP.03/VII/2024

TENTANG

**SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI TAHUN 2024**

Dalam rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, dengan memperhatikan dasar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang berminat dan memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- f. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 199 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- g. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2425/JP.00.00/07/2024 Tanggal 29 Juli 2024 tentang Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.

II. JPT PRATAMA YANG AKAN DIISI

NO	JABATAN	UNIT KERJA
1	Asisten Deputy Pengembangan Perikanan Budidaya	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
2	Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	Asisten Deputy Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

III. PERSYARATAN PESERTA SELEKSI

1. PERSYARATAN UMUM

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter/Rumah Sakit Pemerintah;
- d. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang dibutuhkan;
- e. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik, yang dibuktikan dengan:
 - 1) nilai prestasi kerja pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 2) keterangan tidak sedang/pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
 - 3) keterangan bebas temuan.
- f. Tidak pernah menjadi pimpinan/anggota organisasi terlarang;
- g. Telah menyerahkan SPT Tahunan setidaknya-tidaknya dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- h. Telah menyerahkan LHKPN atau LHKASN dalam jabatan terakhir.

2. PERSYARATAN KHUSUS

- a. Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun 0 (nol) bulan per tanggal 1 Juli 2024;
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. Memiliki pangkat minimal Pembina Tingkat I (IV/b);
- d. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. Sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;

- f. Memiliki sertifikat Bahasa asing (Untuk Bahasa Inggris, minimum score TOEFL 525 atau yang setara);
- g. Untuk jabatan Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
 - a) Berbahasa Inggris aktif lisan maupun tulisan;
 - b) Memahami kebijakan, regulasi, dan target di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta mampu belajar cepat, beradaptasi, dan berpikir strategis dalam menghadapi permasalahan dan dinamika sektor pariwisata yang multi sektor, lintas wilayah, dan sensitif terhadap kondisi global.

IV. DOKUMEN PERSYARATAN YANG DIUNGGAH PADA SAAT PENDAFTARAN

1. Surat Pernyataan Mendaftarkan Diri yang diizinkan dan diketahui oleh atasan langsung bermaterai Rp10.000 (**Lampiran I**);
2. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani dan bermaterai Rp.10.000 (**Lampiran II**);
3. Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang mendapat delegasi kewenangan (**Lampiran III**);
4. Surat Pernyataan Tidak Pernah/Sedang Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dari pejabat yang berwenang yang membidangi kepegawaian bermaterai Rp.10.000 (**Lampiran IV**);
5. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Pimpinan/Anggota Organisasi Terlarang bermaterai Rp10.000 (**Lampiran V**);
6. Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat (**Lampiran VI**);
7. Fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
8. Fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
9. Fotokopi Sertifikat Diklat Kepemimpinan terakhir dan/atau Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional (jika ada) yang dilegalisir;
10. Fotokopi Sertifikat Diklat Teknis maupun Diklat Fungsional yang relevan dengan jabatan yang dilamar (jika ada) yang dilegalisir;
11. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
12. Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
13. Fotokopi tanda terima bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

- Tahun 2023 dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2023;
14. Surat keterangan sehat dari dokter/Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku selama 3 (tiga) bulan;
 15. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 17. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 berlatar belakang merah.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dilakukan mulai tanggal 29 Juli 2024 secara *online* pada *website* <https://maritim.go.id>;
2. Seluruh dokumen persyaratan diunggah ke dalam *website* <https://maritim.go.id> dengan menggunakan format pdf;
3. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) pilihan jabatan;
4. Seluruh pengumuman dan tahapan seleksi akan disampaikan melalui *website* <https://maritim.go.id>

VI. TAHAPAN SELEKSI

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi melalui <i>website</i>	29 Juli 2024
2.	Pendaftaran secara <i>online</i> dan <i>upload</i> berkas administrasi	29 Juli s.d. 12 Agustus 2024
3.	Seleksi dan verifikasi administrasi	29 Juli s.d. 12 Agustus 2024
4.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	13 Agustus 2024
5.	Penulisan Makalah/ <i>Policy Brief</i>	14 Agustus 2024
6	Wawancara	15 Agustus 2024
7	Pengumuman hasil Makalah/ <i>Policy Brief</i>	19 Agustus 2024
8.	Sosialisasi Pelaksanaan Assessment	20 Agustus 2024
9.	<i>Assessment</i>	21 Agustus 2024
10.	Pengumuman hasil akhir seleksi	28 Agustus 2024

VII. KETENTUAN LAIN

1. Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
2. Setiap perkembangan informasi seleksi disampaikan melalui *website* <https://maritim.go.id>
3. Seluruh biaya transportasi, akomodasi, kelengkapan administrasi dan biaya

pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses administrasi ditanggung oleh masing-masing peserta;

4. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Selama proses seleksi sampai dengan pengangkatan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta seleksi Pengisian JPT Pratama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
6. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus dalam seleksi terbuka, wajib melakukan mutasi; dan
7. Bagi pelamar yang tidak memenuhi persyaratan seleksi administrasi, berkas lamaran tidak dikembalikan dan menjadi arsip Panitia Seleksi.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2024

Ketua Panitia Seleksi Terbuka
Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi,

\$_{ttd}\$

Odo R.M. Manuhutu

SURAT PERNYATAAN MENDAFTARKAN DIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat & Tanggal Lahir:
- 3. Pangkat, Gol. Ruang :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Pendidikan Terakhir :
- 7. Alamat Kantor :
- 8. Alamat Rumah :
- 9. Nomor Telepon/HP :
- 10. Email :
- 11. Jabatan Saat Ini :

menyatakan mendaftarkan diri (melamar) sebagai*):
.....
dan bersedia melengkapi semua persyaratan yang berlaku.

Saya akan tunduk pada ketentuan yang berlaku dan tidak akan menuntut apapun terhadap hasil seleksi pendaftaran diri/lamaran ini.

Mengetahui Atasan langsung,

Ttd

Nama:

NIP:

Jabatan:

.....(Kota, tgl & bulan) 2024

Yang Membuat Pernyataan,

Ttd

(Materai Rp10000,00)

Nama:

NIP.:

Catatan:
Untuk pelamar Pejabat Eselon I, atasan langsungnya adalah Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/yang setingkat.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

- 1. NAMA LENGKAP :
- 2. NIP :
- 3. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
- 4. PANGKAT & GOL. RUANG :
- 5. JABATAN/ESELON :
- 6. JENIS KELAMIN :
- 7. AGAMA :
- 8. STATUS PERKAWINAN :

II. PENDIDIKAN

1. Pendidikan di dalam dan di luar negeri

NO	TINGKAT	NAMA PENDIDIKAN	JURUSAN	STTB/TANDA LULUS/IJAZAH	KET
1	2	3	4	5	6

2. Kursus/Latihan di dalam dan di luar negeri

N O	NAMA/ KURSUS/ LATIHAN	LAMANYA TGL/BLN/THN S.D TGL/BLN/THN	IJAZAH/ TANDA LULUS/ SURAT KETERANGAN TAHUN	TEMPAT	KET
1	2	3	4	5	6

III. RIWAYAT JABATAN

NO	JABATAN	DARI TGL/THN S.D TGL/THN	INSTANSI INDUK	KET
1	2	3	4	5

IV. TANDA JASA/PENGHARGAAN

NO	NAMA BINTANG/ SATYA LENCANA/ PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	LAMANYA	KET
1	2	3	4	5

V. **DAFTAR PENILAIAN PRESTASI KERJA (SKP)**

N O	TAHUN	NILAI RATA-RATA	KET
1	2	3	4

VI. **PENGALAMAN LUAR NEGERI**

NO	NEGARA	TUJUAN PENUGASAN	LAMANYA	KET
1	2	3	4	5

VII. **KETERANGAN KELUARGA**

1. Isteri/Suami

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL NIKAH	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7

2. Anak

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL NIKAH	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7

Dengan ini saya menyatakan bahwa Daftar Riwayat Hidup ini telah saya isi dengan benar dan lengkap. Apabila ternyata data yang saya isi terbukti tidak benar, saya bersedia dinyatakan gugur dalam proses seleksi.

....., 2024

(Materai Rp10000,00)

Ttd

Nama:

NIP.:

Keterangan:
Peserta dapat menambahkan baris pada semua tabel apabila data yang perlu ditampilkan belum terakomodasi pada baris tabel yang tersedia.

SURAT PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Memberikan Persetujuan kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :
.....

Untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama*) pada jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2024.

Surat Persetujuan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama*) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

(Kota, tgl & bulan) 2024

(Materai Rp10000,00)

Ttd
Nama:
NIP:

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH/SEDANG MENJALANI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Gol.Ruang :
Unit Kerja :
Instansi :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama:

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :
.....

tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, dan tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Surat Pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

(Kota, tgl & bulan) 2024

(Materai Rp10000,00)
Ttd

Nama:
NIP:

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI TERLARANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi pimpinan/anggota organisasi terlarang.

Surat pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama*) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2024 dan dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala resiko sesuai ketentuan yang berlaku.

(Kota, tgl & bulan) 2024
Yang Membuat Pernyataan,

Ttd
(*Materai Rp10000,00*)

Nama:
NIP :

SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama:

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :
.....

Berdasarkan catatan dari Pemeriksaan Internal yang telah dilakukan, bahwa yang bersangkutan tidak memiliki temuan yang belum diselesaikan terkait jabatan/tugas/fungsi selama bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Surat Keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama*) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kota, tgl & bulan) 2024
Pejabat Yang Berwenang,

(Materai Rp10.000,00)
Ttd

Nama:
NIP:



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email: kemenkomaritim@maritim.go.id

Nomor : B-0762/SESMENKO/KP.03/VII/2024 29 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Kemenko Marves

Kepada Yth
(Daftar Terlampir)
di-
Tempat

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kami mengundang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Bapak/Ibu yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Bapak/Ibu mengenai seleksi dimaksud. Selanjutnya informasi persyaratan dan tahapan seleksi dapat diakses melalui *website* <https://maritim.go.id>

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator,

\$(ttd)

Odo R.M Manuhutu

Tembusan:
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (sebagai laporan).

Lampiran Surat

Nomor : B-0762/SESMENKO/KP.03/VII/2024

Tanggal : 29 Juli 2024

A. Sekretaris Kementerian Koordinator/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
25. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas);
26. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
27. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
28. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf);
29. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
30. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
31. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
32. Sekretaris Utama Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);

B. Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
4. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung;
7. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;

C. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Sekretaris Jenderal Ombudsman;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

D. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
2. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG);
3. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN);
4. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla);
5. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN);
6. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
7. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);
8. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional (BNN);
9. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
10. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
11. Sekretaris Utama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
12. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
13. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
14. Sekretaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
15. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional (BPN);
16. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS);
17. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
18. Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS);
19. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
20. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional (BSN);
21. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN);
22. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
23. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS);
24. Sekretaris Utama Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS);
25. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia (BARANTIN);
26. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (BAPANAS);

E. Sekretaris Daerah Provinsi

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;

4. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
11. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta;
15. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
16. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
17. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
18. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
21. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
22. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
24. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
25. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
26. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
28. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
29. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
30. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
31. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
32. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
33. Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
34. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
35. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya;
36. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah;
37. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan;
38. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan.